

DRS. AHMAD SUGIRI

POLA KEPEMIMPINAN KYAI DALAM TUBUH NAHDLATUL ULAMA (NU)

A. Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi pesantren, dengan tokoh kyai sebagai sentralnya. Perkembangan NU sejak awal kelahirannya pada tahun 1926, menunjukkan betapa besarnya peranan kyai di dalamnya. Realitas itu bukan hanya terlihat dari segi nama "Nahdlatul Ulama" (Kebangkitan Ulama) yang dipilih untuk organisasi itu, tetapi sekurang-kurangnya ada dua hal yang membuat ulama memperoleh posisi yang sedemikian penting dalam tubuh NU. *Pertama*, sebagai organisasi sosial keagamaan, NU harus memilih kekuatan centralnya pada tokoh-tokoh yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara moral, ilmu, amal dan akhlak keagamaannya. Ulama dalam hadits disebut-sebut sebagai "pewaris para Nabi" tentulah yang paling mendekati tuntutan itu. *Kedua* seorang ulama yang paling

kecil lingkup pengaruhnya pun selalu mempunyai kewibawaan dan pengaruh atas santri dan murid-muridnya. Ulama juga mempunyai jalur kewibawaan langsung dengan masyarakat sekelilingnya yang dapat menembus batas-batas kelompok organisasi, batas-batas kedaerahan atau lebih luas lagi.

Kewibawaan dan pengaruh ulama yang sudah membudaya dalam organisasi NU, kemudian diaplikasikan secara formal organisatoris pada struktur kepemimpinan atau kepengurusan lembaga Syuriah, mulai dari pusat sampai ke ranting-ranting. Di bawah Syuriah adalah lembaga Tanfiziah (pelaksana) yang bertugas melaksanakan apa-apa yang telah ditetapkan oleh lembaga Syuriah. Struktur yang demikian ini agaknya berkaitan dengan tradisi pesantren.

Makalah ini akan mencoba menelusuri dengan cermat, bagaimana pola kepemimpinan Kyai

atau Ulama dalam tubuh NU, sebuah organisasi sosial keagamaan yang paling besar di persada ini. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah metode historis-analisis, yaitu suatu metode yang berusaha menelusuri jejak sejarah dari obyek yang hendak diteliti dan hasil teori yang diperolehnya dihubungkan dengan dunia nyata (faktual) (lihat: Ndraha, 1985:103) Di samping itu akan digunakan pendekatan tematik atau studi terhadap beberapa kasus yang pernah terjadi dan memiliki relevansi dengan tema yang sedang dibahas.

B. Pengertian Kyai

Menurut asal-usulnya, perkataan "kyai" dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda: Pertama, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dinggap keramat; umpamanya, "Kyai Garuda Kencana" dipakai untuk sebutan "kereta emas" yang ada di Keraton Yogyakarta; Kedua, gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; Ketiga, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli Agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan ppesantren (Dhofier, 1982:55). Tapi pada perkembangan sekarang-sekarang ini, ba-

nyak juga ulama yang cukup berpengaruh di masyarakat mendapat gelar "kyai" walaupun mereka tidak memimpin pesantren.

Di samping istilah Kyai, dalam pengertian orang yang ahli dalam agama Islam, dikenal pula istilah *ulama*. Perkataan "ulama" berasal dari bahasa Arab. jama' (plural) dari kata '*alim*' yang berarti orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pada perkembangannya perkataan ini agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia, "alim" diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan "ulama" dipakai dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud jama', ditambah perkataan "para" sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga menjadi "para ulama" atau "ulama-ulama" (bandingkan: Alfian, 1975:22).

Yang dimaksud "kyai" dalam makalah ini adalah orang yang ahli dalam agama Islam dan masih terkait dengan tradisi pesantren walaupun secara formal tidak memiliki atau menjadi pemimpin pesantren, tetapi setidaknya-tidaknya masih terikat dengan dunia pendidikan tradisional tersebut.

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, se-

ringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau bukan saja oleh kalangan awam secara intelektual, bahkan juga oleh kalangan intelektual dan birokrat itu sendiri. Mereka terkadang diperankan sebagai "dukun" dalam perspektif Animis, sehingga dianggap mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang secara logika tidak dapat dipecahkan. Akibatnya tidak jarang seorang pejabat atau orang yang ingin tetap menduduki jabatannya mendatangi kyai untuk memohon "restu" walaupun mereka menyadari bahwa secara logis dan empiris para kyai kurang memahami persoalannya. Tetapi mereka yakin bahwa para kyai dengan "kepintaran"nya dapat mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Di samping itu, meskipun mereka tinggal di pedesaan, jauh dari kehidupan kota dengan segala problema sosialnya yang kompleks, mereka diperhitungkan sebagai bagian kelompok elite dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Sebagai kelompok, para kyai memiliki pengaruh yang amat kuat di masyarakat, dan sekaligus merupakan kekuatan penting dalam kehidup-

an politik Indonesia. Seringkali mereka menjadi sumber legitimasi atas kebijakan-kebijakan politik yang akan diterapkan.

Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga hampir semua hubungan sosial dan personal, sehingga dengan demikian memberikan kekuasaan yang luas kepada para kyai dalam masyarakat. Mereka senantiasa mempercayakan kepada kyai bimbingan dan keputusan-keputusan tentang waris, perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Dibarengi dengan sikap mereka yang enggan terhadap urusan-urusan kenegaraan, maka pengaruh mereka yang besar itu memberikan pula kekuasaan moral yang luar biasa, dan mempersembahkan kepada mereka suatu kedudukan sosial yang menonjol (Dhofier, 1982:56).

C. Kepemimpinan Kyai dalam NU

Sebagai telah disinggung di atas bahwa eksistensi NU tidak dapat dilepaskan dari tradisi pesantren, karena memang dunia pesantrenlah yang melahirkan NU. Oleh karena itu untuk memahami bagaimana struktur kepemimpinan dalam tubuh NU, terlebih dahulu kita harus mema-

hami struktur kepemimpinan dalam dunia pesantren itu sendiri.

Pola kepemimpinan kyai dalam dunia pesantren bila ditelusuri berasal dari akar budaya Jawa, sebagai kesinambungan dari pola kepemimpinan dalam kehidupan politik dan kenegaraan masyarakat Jawa pra Islam. Soemarsaid Moertono (1985:32) menjelaskan bahwa konsep orang Jawa tentang organisme negara, raja atau ratulah yang menjadi eksponen mikrokosmos. Dalam pikiran orang Jawa, kosmos dibagi menjadi dua, yaitu mikrokosmos (dunia manusia, dunia nyata) dan makrokosmos (alam gaib), dan raja dianggap sebagai penghubung antara dua bentuk kosmos tersebut. Pada masa Hindu Raja bahkan dianggap sebagai manifestasi ketuhanan dalam kehidupan mikrokosmos tersebut. Sehingga apa yang dikatakan raja, dipandang sebagai hukum yang harus dilaksanakan, karena dengan menjalankan perintah raja, sekaligus melaksanakan perintah Tuhan.

Setelah Islam masuk, terjadi perubahan dalam pandangan tentang siapa yang kemudian dianggap sebagai wakil atau simbol dari kekuatan dan makrokosmos. Secara teori, teologis Islam telah menempatkan penguasa negara dalam posisi yang tidak setinggi seperti pada waktu zaman Maja-

pahit. Di samping itu, teologi Islam juga tidak mengakui adanya seorang manusia yang dapat dianggap sebagai simbol dari kekuatan makrokosmos, karena teologi Islam tidak mengenal hirarkis kependetaan. Walaupun Islam juga beranggapan ada Nabi-Nabi yang diberi keistimewaan sebagai utusan Tuhan dan para ulama sebagai pewaris para nabi. Hal ini berakibat bahwa para penguasa kini tidak bisa memegang monopoli dalam usaha mewakili simbol kekuatan makrokosmos dalam pandangan kosmologi orang Jawa. Sejak Islam menjadi agama resmi orang Jawa, para penguasa kini harus berkompetisi dengan para kyai dalam bentuk hirarki kekuasaan yang lebih rumit; sebab para kyai yang sepanjang hidupnya memimpin aktivitas kehidupan keagamaan, juga telah memperoleh pengaruh politik. Soemarsaid Moertono (1985:33) berpendapat bahwa perjuangan kekuasaan yang selalu muncul antara kedua kekuatan tersebut yang terus berlangsung sampai zaman kejayaan Mataram biasanya selalu dimenangkan oleh pihak penguasa. Tetapi persaingan antara keduanya (dalam merebut kepemimpinan sosial dalam masyarakat Jawa) tidak pernah padam; dan tetap berlangsung sampai sekarang. Menurut Moer-

tono, para kyai telah memainkan peranan politik yang sangat menentukan, terutama ketika terjadi konflik-konflik politik yang dipandang sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan moral agama.

Berangkat dari hipotesis tersebut diatas, dapat dijadikan sebagai kerangka acuan untuk memahami pola kepemimpinan kyai dalam tubuh NU. Kyai sebagai kelompok elite dalam struktur kepemimpinan NU, terlihat dari kedudukan mereka dalam lembaga Syuriah atau dewan legislatif. Lembaga ini berperan sebagai posisi kunci dan menentukan. Ia adalah lembaga tertinggi yang mengemban kewenangan untuk membina, membimbing, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi dari pusat sampai ke ranting-ranting (Lihat: Achmad Siddiq, 1979:13). Dalam Anggaran Rumah Tangga NU, selalu dirumuskan tugas dan wewenang Syuriah: *Pertama*, setiap awal tahun hijriah memberikan pengarahan dalam rapat pleno untuk menjabarkan program tahunan; *kedua*, setiap akhir tahun hijriah menerima dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh Tanfidziah; *ketiga*, memberikan teguran, saran dan bimbingan kepada seluruh perangkat organisasi; *keempat*, berhak membatalkan segala pu-

tusan atau kebijaksanaan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

Di bawah lembaga ini adalah lembaga *Tanfidziah* (pelaksana/ eksekutif). Sesuai dengan namanya, Tanfidziah berperan sebagai "sinoman" yang melayani dan melaksanakan petunjuk yang ditetapkan Syuriah. Tanfidziah tidak mempunyai hak untuk menolak keputusan yang diambil oleh Syuriah. Tata kerja yang demikian ini jelas berakar pada tradisi pesantren yang sangat menekankan sikap patuh dan tunduk kepada kyai. *Tanfidziah* dalam konteks ini merupakan "santri" yang lemah karena masih dalam taraf belajar kepada kyai. Betapapun pandainya mereka dalam bidang politik, tetapi posisi mereka tetap sebagai santri yang harus patuh kepada kyai.

Kasus pergolakan intern NU pada tahun 1982 pada dasarnya merupakan upaya pengetatan kembali dominasi kepemimpinan Syuriah (baca: Kyai) yang waktu itu dirasakan telah mengendor, terutama sebagai akibat keterlibatan NU dalam dunia politik praktis. Para kyai sejak awal memiliki paradigma yang bersumber pada nilai agama dan politik yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Machrus Irsyam (1982:77), paradigma inilah yang memben-

tuk kultur yang sifatnya laten pada komunitas NU. Kultur ini bermanifes dalam suatu struktur elitis yang terdiri dari ulama dan politisi. Pola interaksi dan tingkah laku antara ulama dengan politisi membentuk identitas NU yang bersifat ambivalen. Sementara di lain pihak, gelombang arus transformasi dari atas melanda pula komunitas NU yang menawarkan paradigma baru. Paradigma baru ini menghendaki perubahan kultur yang **laten**, yaitu memisahkan nilai agama dengan politik. Pada tingkat **struktur**, paradigma baru itupun menghendaki peranan yang **berorientasi** profesionalisme sehingga ulama dan politisi sebaiknya berpisah. Fenomena demikian dipandang oleh para kyai bukan saja akan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi kehidupan NU itu sendiri, juga bertentangan dengan pola kepemimpinan dalam tradisi pesantren dan sekaligus budaya organisme kenegaraan orang Jawa. Padahal pola ini telah dicanangkan sejak masa-masa paling awal oleh para pendiri NU.

Persoalannya kini adalah, bila peran itu terus dipertahankan maka ulama akan kehilangan identitas sosial karena akan menjadi eksklusif dan terpotong dengan masyarakat tempatnya berpijak yang sedang meniti arus

transformasi. Para politisi yang memiliki dasar pemikiran yang berpangkal pada perhitungan untung dan rugi dilihat dari kepentingan politik satu pihak, dan di pihak lain para kyai yang memperjuangkan asas-asas keagamaan, seharusnya perhitungan politik sekunder sifatnya. Karena sifatnya yang demikian, NU terjebak pada orientasi yang berwatak taktis dan terkadang pula terkesan kompromistik dan oportunistik, tidak bersadar kepada kejelasan strategi. Sebagai akibatnya antara politisi dan para kyai akan sulit untuk dipertemukan. Karena bagaimanapun para kyai secara konstitusional, memiliki kewenangannya untuk menginterpretasikan masalah-masalah politik sesuai dengan persepsi keagamaan NU itu sendiri. Atau dengan kata lain, refleksi politik NU merupakan hasil ijtihad kyai mengenai ajaran agama kaitannya dengan politik. Sebaliknya, bila peran itu akan dibiarkan melonggar, dan para politisi dibiarkan bertindak sesuai dengan profesionalismenya sebagai politisi, maka tradisi kepemimpinan dalam NU dengan sendirinya akan berubah.

D. Upaya Mempertahankan Tradisi Kepemimpinan Kyai

Sejarah ternyata memberikan pelajaran yang banyak atas perjalanan NU. Keterlibatan para tokoh-tokohnya di tingkat nasional terhadap proses perkembangan politik di tingkat bangsa maupun lingkungan umat Islam, ternyata menumbuhkan percaya diri yang demikian besar pada organisasi ini. Rintisan yang dilakukan untuk menghadirkan NU dalam percaturan politik, pada gilirannya kelak mendatangkan implikasi yang sangat luas dalam keseluruhan wawasan dan kehidupan organisasi ini.

Ketika NU memasuki gelanggang politik secara total melalui Mukhtamar Palembang pada tahun 1952, ia menghadapi suatu tuntutan yang sama sekali lain dari kehidupannya sebagai jam'iyah. Dalam tahap ini dihampir semua eselon, NU melakukan upaya untuk memenuhi tuntutan itu. Salah satunya adalah membuka peluang kepada kelompok-kelompok non-ulama untuk mengisi berbagai posisi yang diperoleh NU. Sebagian dari mereka adalah tenaga-tenaga intelektual serta para politisi muda, yang terkadang tidak memiliki latar belakang tradisi keagamaan yang jelas, menurut Abdurrahman Wahid (1982:120)

langkah itu memang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan sebagai partai politik waktu itu. Apalagi tidak lama kemudian NU harus mengikuti pemilu 1955, dan usaha-usaha tersebut ternyata membawa hasil yang gemilang, karena hasil Pemilu 1955, NU menempatkan dirinya dalam kelompok empat besar (PNI, Masyumi, NU dan PKI) (lihat; Alfian, 1978:16).

Kehadiran politik ini dalam perkembangannya membawa dampak yang cukup serius dalam tubuh NU, diantaranya adalah terbengkalainya penggarapan dalam bidang perekonomian, atau lebih tepat perdagangan yang telah ditentukan dalam peraturan dasar organisasi tersebut (Deliar Noer, 1980:253). Di samping itu bidang pendidikan, terutama podok pesantren yang tersebar luas di persada ini, memerlukan pengembangan lebih lanjut baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga akan mampu menghadapi tantangan sebagai akibat perubahan sosial. Karena apabila bidang ini dibiarkan terbengkalai, kurang mendapat perhatian maka eksistensi NU itu sendiri sebagai organisasi yang berwawasan keagamaan kurang memiliki, untuk tidak mengatakan kehilangan, akarnya yang paling penting.

Berangkat dari pemikiran di

atas, tepatlah kiranya ketika para ulama NU pada Mu'tamar Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syaf'iyah Sukarejo, Situbondo, Jawa Timur pada bulan Agustus 1983, dan Mukhtamar ke-27 ormas keagamaan Islam terbesar ini setahun kemudian di tempat yang sama, memutuskan bahwa NU telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi, dan yang lebih penting lagi kebijaksanaan untuk kembali kepada Khittah (garis perjuangan) tahun 1926 (lihat: Dawam, 1985:267). Dengan demikian NU secara formal tidak lagi terikat pada aktifitas politik praktis dalam tubuh PPP, untuk kemudian menekankan pada orientasi sosial dan keagamaan. Penekanan pada orientasi ini dirumuskan dalam bentuk program kegiatan da'wah Islamiyah, pengajaran dan pendidikan, baik formal, informal maupun non formal di bidang keagamaan dan keterampilan. Program lain ialah usaha perbaikan sosial ekonomi umat dalam rangka peningkatan taraf hidup warga NU dan masyarakat luas umumnya.

Keputusan NU untuk kembali ke Khittah 1926, merupakan sebuah terobosan yang tepat, terutama ketika mekanisme politik mengarah pada alur yang mono-

litik. Karena pada dataran praktisnya, aktivitas perpolitikan Indonesia dewasa ini cenderung menuju pada alur yang sama. Baik para politisi yang berasal dari Golkar maupun PPP dan PDI mempunyai jiwa dan tujuan politik yang sama yaitu mendukung Orde Baru, Pembangunan, Stabilitas dan lain-lain. Bahkan para politisi yang berasal dari partai ketika terpilih menjadi anggota legislatif justru lebih menjadi "Golkar" dalam setiap sidang di lembaga terhormat itu terutama untuk tingkat DPRD II yang kurang mendapat perhatian dari pers.

Dilihat dari keterkaitannya dengan kepemimpinan Kyai adalah, bahwa sejarah perjuangan NU dalam kancah percaturan politik praktis, telah memperlihatkan kecenderungan pemerosotan kharisma kyai sebagai dewan legislatif (Syuriah). Atau dengan kata lain, politik dalam pandangan kyai merupakan "anak nakal" yang sering mengganggu dan menyembunyikan tongkat kyai. Oleh karena itu perlu dihentikan kenakalannya sehingga tidak berani lagi menyembunyikan tongkat kyai. Sementara kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial keagamaan, dakwah Islamiyah, pengajaran dan pendidikan, telah terbukti menjadikan "anak-anak yang patuh dan berbakti" kepada

kyai, serta sekaligus sebagai pendukung tradisi kepemimpinan Kyai dalam NU.

Upaya untuk menggoncang tradisi kepemimpinan pesantren atau kyai ini masih akan terus berlanjut. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan kasus pemilihan ketua umum NU pada muktamar NU di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, beberapa tahun yang lalu. Bermula dengan munculnya tokoh Abu Hasan yang mencalonkan diri sebagai ketua umum NU. Sedang calon lainnya adalah Abdurrahman Wahid, yang waktu itu masih berstatus sebagai ketua umum periode sebelumnya. Abu Hasan berupaya merebut tampuk kepemimpinan dari tangan Abdurrahman Wahid. Abu Hasan dengan kekuatan finansialnya berusaha mempengaruhi cabang-cabang NU, terutama yang berasal dari luar Jawa, untuk mendukungnya. Ada beberapa pengurus cabang NU yang kemudian mendukung. Tapi upaya itu menemui kegagalan, karena ketika pemilihan dilakukan, ternyata suara terbanyak mendukung Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum NU periode mendatang.

Ilustrasi tersebut sangat menarik bila dilihat dari pola kepemimpinan dalam tubuh NU. Kegagalan Abu Hasan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor,

antara lain: *Pertama*, Abu Hasan boleh dikatakan sebagai "orang baru" dalam komunitas NU. Massa NU, terutama yang dari Jawa belum mengenal secara dekat asal-usulnya, terutama dari segi keagamaan. Sementara Abdurrahman Wahid sebagai saingannya boleh dikatakan cukup populer dikenal oleh hampir semua kalangan masyarakat walaupun seringkali ceplas-ceplos melontarkan pemikiran yang kontroversial. *Kedua*, Abu Hasan kurang dikenal kental dengan tradisi pesantren yang lebih menekankan jaringan kekeluargaan, ketimbang perhitungan material. Sementara Abdurrahman Wahid, di samping begitu kental dengan tradisi pesantren, putera mantan Menteri Agama, dan cucu pendiri NU. Maka tepatlah apa yang diuraikan Dhofier (1982:79-96), persoalannya antara lain dapat ditelusuri dari hubungan kekerabatan genealogi sosial kyai pesantren, umpamanya dari Sistem perkawinan di lingkungan para Kyai di Jawa, dan Abdurrahman Wahid adalah gambaran dari tradisi pesantren. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian ia menjadi figur yang paling kuat dalam NU.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola

kepemimpinan Kyai dalam tubuh NU mengadopsi dari pola kepemimpinan mereka di pesantren. Kyai sebagai salah satu elemen yang sangat menentukan di pesantren, memiliki kharisma yang begitu besar bukan saja di kalangan para santrinya, tetapi menembus batas-batas desa dan daerah. Sebagai akibatnya menjadi kelompok elite dalam struktur sosial masyarakat. Pola kepemimpinan kyai di pesantren ini berakar pada budaya kosmologi orang Jawa.

DAFTAR PUSAKA

- Abdullah, Taufik, ed., *Agama dan Perubahan Sosial*, Cet.1, Rajawali, Jakarta, 1983
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Ylls, Jakarta, 1978
- Benda, Harry J., *The Crescent and The Rising Sun*, Terj. Daniel Dhakidae, Pustaka, Jaya, Jakarta, 1980
- Dahlan, "Kembali Ke Khittah NU 1926: Meluruskan Tradisi NU", dalam *Mutiara*, no. 270., 1982
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, cet.1, LP3ES, Jakarta, 1982
- Yusuf, Slamet Effendi, Dkk., *Dinamika Kaum Santri*, cet. 1, Rajawali, Jakarta, 1993
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet.1, LP3ES, Jakarta 1982
- Moertono, Soermarsaid, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*, cet.1, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1985
- Siddiq, Ahmad, *Khittah Nahdiyah*, Balai Buku, Surabaya, 1979
- Rahardjo, M. Dawam, ed., *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, cet. 1, P3M, Jakarta, 1985
- Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Leppenas, Jakarta, 1981